

# **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK DI KOTA MAKASSAR PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MAKASSAR**

**<sup>1</sup>Nurhayati**

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar  
[Nurhayatijamal315@gmail.com](mailto:Nurhayatijamal315@gmail.com)

**<sup>2</sup>Andi Aslinda**

Staf Pengajar Program Studi Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar  
[Aslinda110@yahoo.com](mailto:Aslinda110@yahoo.com)

**<sup>3</sup>Haedar Akib**

Guru Besar Ilmu Administrasi Universitas Negeri Makassar  
[Haedar652002@yahoo.com.au](mailto:Haedar652002@yahoo.com.au)

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Makassar pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar dalam rangka pemenuhan hak dan perlindungan anak. KLA merupakan sistem pembangunan yang berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak sesuai dengan teori Mazmanian & Sabatier yaitu karaktersitik masalah, karakteristik kebijakan dan lingkungan kebijakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan KLA di Kota Makassar berdasarkan ketiga indikator terdapat satu indikator yang masih kurang baik dalam pelaksanaannya yaitu indikator lingkungan kebijakan bahwa kondisi sosial ekonomi merupakan salah satu faktor yang sangat berpotensi menyebabkan banyaknya anak yang menjadi korban kekerasan belum mampu ditangani dengan baik oleh pemerintah serta kualitas SDM yang masih kurang dalam memahami pemenuhan hak dan perlindungan anak dalam menjalankan kebijakan KLA di kota Makassar.

**Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kota Layak Anak, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Terhadap Anak.**

## **ABSTRACT**

*This study aims to determine the implementation of the Child Friendly City Policy (KLA) in Makassar City at the Office of Women's Empowerment and Child Protection in Makassar City in order to fulfill the rights and protection of children. KLA is a development system based on children's rights through the integration of commitments and resources from government, business and society, which are planned thoroughly and sustainably in policies, programs and activities to ensure the fulfillment of children's rights and protection in accordance with Mazmanian & Sabatier's theory, namely problem characteristics, policy characteristics and the policy environment. The results of this study indicate that the implementation of the KLA Policy in Makassar City based on the three indicators, there is one indicator that is still not good in its implementation, namely the policy environment indicator that socio-economic conditions are one of the factors that have the potential to cause the number of children who become victims of violence cannot be handled properly. by the government and the quality of human resources who are still lacking in understanding the fulfillment of rights and child protection in implementing the KLA policy in the city of Makassar.*

***Keywords: Policy Implementation, Child Friendly City, Fulfillment of Rights and Protection of Children.***

## 1. Latar Belakang

Anak merupakan salah satu aset dan investasi terbesar yang dimiliki oleh sebuah bangsa dan negara yang diyakini mampu menjadi penerus generasi dimasa yang mendatang. Anak memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan yang diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam sebuah pembangunan. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan”.

Menurut *Profil Anak Indonesia 2018*, hasil proyeksi penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2018 menunjukkan bahwa 30,1% atau 79,55 juta jiwa penduduk Indonesia adalah penduduk dengan usia anak 0-17 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa masa depan dan kelangsungan hidup bangsa ada pada sepertiga dari penduduk Indonesia.

Indonesia telah meratifikasi konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1989 mengenai *Universal Declaration of Human Rights* (deklarasi hak-hak asasi manusia). Merujuk pada konvensi tersebut maka lahirlah *Convention on the Rights of the Child* (konvensi hak-hak anak) yang diatur dalam regulasi Keputusan

Presiden No.36 tahun 1990. Selain itu Indonesia juga telah mengesahkan undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diubah dengan undang-undang No.35 tahun 2014.

Sebagai perwujudan dan tanggung jawab pemerintah atas ratifikasi Konvensi Hak Anak, Indonesia telah berkomitmen untuk mendukung gerakan *World Fit for Children* (Dunia Layak Anak) pada 10 Mei 2002 pada sidang PBB serta mewujudkan Indonesia Layak Anak yang kemudian disingkat menjadi IDOLA yang ditargetkan dapat terwujud pada tahun 2030 melalui pengembangan kota layak anak. Untuk mewujudkan Indonesia Layak Anak maka Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPP-PA RI) mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Dengan adanya kebijakan tersebut, diharapkan agar seluruh kabupaten/kota yang ada di Indonesia dapat memberikan kesejahteraan bagi anak-anak Indonesia.

Kota Layak Anak (KLA) adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana dan

berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Artinya dalam hal ini, terdapat tiga unsur yang terlibat didalamnya, yakni pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

KLA telah diinisiasi sebanyak 360 kabupaten/kota yang terdiri dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Pada tahun 2019 sebanyak 135 kabupaten/kota di Indonesia berhasil meraih predikat Pratama, 86 kabupaten/kota meraih predikat Madya, dan 23 kabupaten/kota meraih predikat Nindya, dan 3 kabupaten/kota yang meraih predikat Utama (*AntaraNews.com, 2019*). Sulawesi Selatan mendapatkan nominasi sebagai provinsi penggerak kabupaten/kota layak anak pada tahun 2019 (*IndoNews.id, 2019*). Sebanyak 14 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan yang telah meraih penghargaan KLA, salah satunya adalah Kota Makassar dengan kategori Nindya (*P. P. S. Selatan, 2020*). Kota Makassar telah mencanangkan Kota Layak Anak (KLA) pada 22 September 2014 oleh Walikota Makassar melalui tim penggerak PKK Kota Makassar dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPPPA) Kota Makassar dengan tujuan untuk membangun inisiatif pemerintah kota agar mengarah pada kebijakan, program, strategi dan kegiatan pembangunan yang mengutamakan hak anak. (*Hamudy, 2015*).

Kota Makassar merupakan ibukota provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki potensi dan menjadi salah satu kota pusat pembangunan. Sebagai ibukota provinsi, kota Makassar menjadi perhatian besar bagi pemerintah dalam perkembangan dan kemajuannya. Oleh karena itu pembangunan di berbagai sektor tentunya harus diimbangi dengan pertumbuhan anak-anak di Kota Makassar, baik dalam hal pemenuhan hak maupun perlindungan terhadap anak.

Untuk meningkatkan komitmen pemerintah kota Makassar dalam mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, serta meningkatkan kemampuan dan partisipasi anak dalam proses perencanaan pembangunan untuk mewujudkan kota layak anak maka walikota Makassar mengeluarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kota Layak Anak.

Meskipun telah dinobatkan sebagai kota layak anak serta adanya regulasi yang mengatur tentang pemenuhan hak anak, tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat banyak masalah yang terjadi pada anak-anak di kota Makassar. Besarnya angka kekerasan yang terjadi pada anak di kota Makassar merupakan salah satu permasalahan yang urgent dalam pemenuhan hak

dan perlindungan anak. Kekerasan yang terjadi pada anak memberikan dampak negatif secara fisik dan psikis berupa trauma atau gangguan secara mental yang sangat berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan anak.

Kasus pelanggaran hak-hak anak yang terjadi di kota Makassar dapat dikatakan masih cukup besar dan mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai 2019. Hal ini dapat dilihat bahwa kasus yang banyak terjadi adalah kekerasan fisik yang pada tahun 2016 hingga 2019 sebanyak 744, sementara pada tahun 2018 kasus kekerasan fisik pada anak menunjukkan angka paling tinggi yaitu 255 kasus. Selanjutnya kasus kekerasan seksual sebanyak 502, kasus anak berhadapan dengan hukum sebanyak 266, kasus kekerasan psikis anak sebanyak 174, kasus penelantaran anak sebanyak 91, kasus trafficking anak sebanyak 24, dan kasus lainnya yang dihadapi oleh anak sebanyak 560. Hal ini menggambarkan bahwa kondisi anak-anak yang ada di kota Makassar sedang tidak aman dan memerlukan perlindungan.

Sebagaimana yang tercatat dalam Undang - Undang Dasar Negara Tahun 1945 pasal 28 ayat 2 “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Oleh karena itu anak perlu diberikan perlindungan dan

dipenuhi hak-haknya untuk mendapatkan kesempatan seluas-luasnya dalam pertumbuhan dan perkembangannya sebagaimana mestinya baik secara jasmani maupun rohani, serta mentalitas dan moralitas.

Berdasarkan pemaparan diatas penelitian ini lebih tertuju pada pada kluster perlindungan khusus, dikarenakan perlindungan merupakan salah satu cara untuk memperoleh rasa aman dan nyaman agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana mestinya, demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara fisik, mental, dan sosial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, kluster Perlindungan Khusus Anak terdiri dari:

- a) Anak dalam Situasi Darurat, anak yang mengalami situasi darurat karena kehilangan orang tua/pengasuh/tempat tinggal dan fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar (sekolah, air bersih, bahan makanan, sandang, kesehatan, dan sebagainya) yang perlu mendapatkan prioritas dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak dasarnya.
- b) Anak yang Berhadapan dengan Hukum, memastikan bahwa anak-anak yang berhadapan

dengan hukum mendapatkan perlindungan dan akses atau tumbuh kembangnya secara wajar, dan memastikan diterapkannya keadilan restoratif dan prioritas diversifikasi bagi anak, sebagai bagian dari kerangka pemikiran bahwa pada dasarnya anak sebagai pelaku pun adalah korban dari sistem sosial yang lebih besar.

- c) Anak dalam Situasi Eksploitasi, situasi eksploitasi adalah segala kondisi yang menyebabkan anak tersebut berada dalam keadaan terancam, tertekan, terdiskriminasi dan terhambat aksesnya untuk bisa tumbuh kembang secara optimal. misalnya dijadikan pekerja seksual, joki narkoba, pekerja anak, pekerja rumah tangga, perdagangan dan penculikan anak, atau pengambilan organ tubuh.
- d) Anak yang Masuk dalam Kelompok Minoritas dan Adat, memastikan bahwa anak-anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dijamin haknya untuk menikmati budaya, bahasa dan kepercayaannya.

Adapun penelitian yang telah mengkaji mengenai kota layak anak antara lain Dianto (2015) yang berjudul “Implementasi Program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Desa Sendangtiro, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta”. Hasil

penelitian ini yaitu dihasilkannya komitmen pemerintah Desa dalam mewujudkan kota layak anak di Desa Sendangtiro. Penelitian ini memfokuskan pada pembangunan desa yang dapat mendukung perkembangan anak.

Selanjutnya Abdi (2014) dengan judul penelitian “Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Di Tangerang Selatan” menyimpulkan bahwa pengimplementasian KLA di Kota Tangerang Selatan dalam memenuhi Konvensi Hak Anak berjalan baik dan sebagian besar hak-hak anak sudah dapat terpenuhi.

Adapun perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu penelitian ini hanya merujuk pada salah satu kluster Kota Layak Anak (KLA). Peneliti lebih memfokuskan penelitian ini pada kluster Perlindungan Khusus. Dengan alasan karena fenomena yang terjadi pada anak di kota Makassar lebih merujuk pada kluster perlindungan khusus, yakni masih banyak anak-anak yang mengalami kekerasan secara fisik dan psikis, baik dalam lingkup keluarga maupun dalam lingkup masyarakat, yang dimana kota Makassar saat ini merupakan kota layak anak. Berdasarkan hal tersebut peneliti hendak melakukan penelitian yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Program Kota Layak Anak (KLA) Di Kota Makassar**

**pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar”**

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, untuk lebih mengarahkan penulisan ini maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan program Kota Layak Anak (KLA) di Kota Makassar.

## **3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan program Kota Layak Anak (KLA) di Kota Makassar.

## **4. Tinjauan Pustaka**

### **A. Konsep Kebijakan Publik**

Istilah kebijakan seringkali dipertukarkan dengan tujuan (*goals*), program, keputusan (*decisions*), proposal, undang-undang, rancangan besar serta ketentuan-ketentuan lainnya. Istilah kebijakan atau *policy* digunakan untuk menunjukkan perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Anderson dalam Tahir, (2014:21) mengemukakan kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seorang

pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah.

Menurut Nugroho dalam Tahir (2014:26) kebijakan adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Sementara Syafiie dalam Tahir (2014:20) mendefinisikan kebijakan publik semacam jawaban terhadap suatu masalah karena merupakan upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur, inovasi, dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah.

Implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan pelaksanaan keputusan yang biasanya dilaksanakan dalam bentuk undang-undang, tetapi dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting ataupun keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya. Mazmanian & Sabatier yang dalam Agustino (2017:128).

Implementasi kebijakan atau program, secara garis besar dipengaruhi oleh isi kebijakan dievaluasi dengan cara mengukur luaran program berdasarkan tujuan kebijakan. Luaran program dilihat

melalui dampaknya terhadap sasaran yang dituju baik individu maupun masyarakat. Luaran implementasi adalah perubahan dan diterimanya perubahan oleh kelompok sasaran. Oleh karena itu diasumsikan bahwa jika lingkungan berpandangan positif terhadap suatu kebijakan maka akan menghasilkan dukungan positif sehingga lingkungan berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi kebijakan. Sebaliknya, jika lingkungan berpandangan negatif maka akan terjadi benturan sikap sehingga proses implementasi terancam akan gagal. (Akib, 2010).

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses aktivitas yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan untuk memperoleh sebuah hasil yang sesuai dengan sasaran atau tujuan dari kebijakan itu sendiri. Secara sederhana, implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. (Akib, 2010).

Dalam sejarahnya perkembangan studi implementasi kebijakan, dijelaskan tentang adanya dua pendekatan guna memahami implementasi kebijakan, yakni *top down* dan *bottom up*. Pendekatan *top down* disebut sebagai logika berpikir dari ‘atas’ ke ‘bawah’ atau pendekatan *policy centered*, atau disebut juga sebagai pendekatan yang didominasi oleh pemerintah, yang merupakan pendekatan

terprogram atau pemetaan ke depan (*forward mapping*).

Adapun tokoh-tokoh yang menganut model implementasi *top down* generasi I, diantaranya adalah Donald Van Meter & Carl Van Horn (1975), George C. Edward III (1980), Merilee S. Grindle (1980), Daniel H. Mazmanian & Paul A. Sabatier serta Cheema & Rondinelli (1983).

## **B. Konsep Kota Layak Anak**

Menurut Lynch bahwa lingkungan kota yang terbaik untuk anak adalah yang mempunyai komunitas yang kuat secara fisik dan sosial; komunitas yang mempunyai aturan yang jelas dan tegas, yang memberi kesempatan pada anak dan fasilitas pendidikan yang memberi kesempatan anak untuk mempelajari dan menyelidiki lingkungan dan dunia mereka. Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) juga didasarkan pada *UN Special Session on Children*, Mei 2002, para walikota menegaskan komitmen mereka untuk aktif menyuarakan hak anak, pada pertemuan tersebut mereka juga merekomendasikan kepada seluruh walikota seluruh dunia untuk (1) mengembangkan rencana aksi untuk kota mereka menjadi Kota Ramah Anak dan melindungi hak anak, dan (2) mempromosikan peran serta anak sebagai aktor perubahan dalam proses pembuatan keputusan di kota mereka terutama dalam pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pemerintah kota. (Patilima, 2017).



Kota Layak Anak (KLA) adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamain terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

a. Tujuan kebijakan KLA

Secara umum program kota layak anak bertujuan untuk memenuhi hak dan melindungi anak. Sedangkan secara khusus, kota layak anak bertujuan untuk membangun inisiatif pemerintah kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi konvensi hak anak, menciptakan strategi dan intervensi pembangunan dalam bentuk kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak pada suatu wilayah kabupaten/kota.

b. Prinsip dan Strategi Pengembangan KLA

Dalam pengembangan kota layak anak dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang meliputi non diskriminasi, kepentingan terbaik untuk anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, penghargaan terhadap pandangan anak, serta

didukung oleh tata pemerintahan yang baik.

Selain itu dalam pengembangan KLA juga diperlukan strategi-strategi dalam mewujudkan kota layak anak, seperti Pengarasutamaan Pemenuhan Hak Anak (PUHA), penguatan kelembagaan, perluasan jangkauan, membangun jaringan, pelembagaan dan pembudayaan kota layak anak, Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (PKIE), serta sertifikasi dan apresiasi terhadap pengembangan KLA.

c. Alur Pikir KLA

Menurut Peraturan Menteri PPPA Negara RI Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Indikator KLA dibuat dalam rangka untuk mengukur kabupaten/kota menjadi layak anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama seluruh pemangku kepentingan di tingkat nasional dan daerah, menetapkan 31 indikator pemenuhan hak anak, yang kemudian indikator tersebut dikelompokkan menjadi 6 bagian, yaitu bagian penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak, yaitu: Kluster I: Hak Sipil dan Kebebasan Kluster II: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif Kluster III: Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar Kluster IV: Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya Kluster V: Perlindungan Khusus

## 5. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif ini dipilih karena peneliti akan mengungkapkan data berdasarkan pengamatan dan menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat berdasarkan data-data hasil temuan observasi di lapangan.

Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif bertujuan agar mempermudah peneliti untuk menggali fakta mengenai Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Makassar pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar.

## 6. Hasil Penelitian

### a. Karakteristik Masalah

Dalam mengendalikan mudah atau tidaknya masalah yang dihadapi oleh lembaga P2TP2A sudah baik dalam pelaksanaan implementasi kebijakan kota layak anak di kota Makassar. Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan seperti memberikan pemahaman kepada para implementor melalui pelatihan-pelatihan untuk mengenali segala bentuk kekerasan dan pola pendekatan terhadap anak dalam penanganan kasus, serta melakukan pengoptimalan sosialisasi terkait dengan kebijakan kota layak anak melalui berbagai kegiatan atau

program pemenuhan hak dan perlindungan anak untuk membangun pemahaman dan perspektif yang sama terkait dengan isu pemenuhan hak dan perlindungan anak.

### b. Karakteristik Kebijakan

Implementasi kebijakan kota layak anak di kota Makassar sudah baik dalam pelaksanaannya, tetapi perlu adanya peningkatan anggaran agar seluruh indikator Kota Layak Anak (KLA) dapat terpenuhi dan terwujudnya kota Makassar sebagai kota yang layak bagi anak. Implementasi kebijakan KLA di kota Makassar diatur dalam regulasi kebijakan Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kota Layak Anak (KLA) dan dalam pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak tertuang dalam kebijakan Peraturan Daerah kota Makassar Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak. Penurunan kasus kekerasan terhadap anak dari tahun 2018-2020 menandakan bahwa sistem perlindungan anak di kota Makassar serta penanganan anak yang memerlukan perlindungan khusus yang menjadi korban tindak kekerasan dapat dikatakan sudah baik.

Hal lainnya yang membuktikan bahwa implementasi kebijakan KLA sudah terlaksana dengan baik dibuktikan dengan penghargaan kategori Nindya yang diraih kota Makassar dalam mewujudkan KLA karena banyaknya

program dan inovasi yang menjadi percontohan bagi kabupaten/kota lain dalam memberikan pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak seperti shelter warga, forum anak, dongeng keliling, kartu anak makassar, Dottoro'tta (layanan home care), Passikola (angkutan sekolah), Dongeng Keliling (Dongkel).

### **c. Lingkungan Kebijakan**

Implementasi kebijakan kota layak anak di kota Makassar berdasarkan indikator lingkungan kebijakan belum terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih lemah banyak menyebabkan anak menjadi korban kekerasan dalam lingkungan masyarakat bahkan keluarga. Rendahnya tingkat ekonomi atau faktor kemiskinan dan pola asuh orang tua yang tidak benar serta kondisi lingkungan anak sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak yang juga menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak.

Faktor penyebab yang tergolong dalam hak ekosob (ekonomi, sosial, budaya) merupakan hak yang tidak dapat dipenuhi secara langsung dan instan oleh pemerintah sebab hak ekosob dalam pemenuhannya dilakukan secara bertahap. Berbeda dengan hak sipol (sipil, politik) yang harus segera dipenuhi karena menyangkut dengan identitas seorang anak, yang mana apabila hak identitas seorang anak tidak terpenuhi maka kelangsungan

hidup anak tersebut tidak mendapat jaminan dari negara.

Dalam pelaksanaan kebijakan program KLA kuantitas sumber daya manusia yang dimiliki sudah cukup, namun kualitas para implementor dalam menjalankan tugasnya yaitu dianggap masih kurang karena masih minimnya pengetahuan dan pemahaman para implementor mengenai isu perlindungan anak dan pengintegrasian KLA.

## **7. Kesimpulan, Implikasi, dan Saran**

### **a. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di kota Makassar berdasarkan tiga indikator implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Daniel H. Mazmanian & Paul A. Sabatier yaitu Karakteristik masalah, Karakteristik kebijakan dan Lingkungan kebijakan. Maka dapat disimpulkan bahwa:

#### **1. Karakteristik masalah.**

Dalam implementasi kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di kota Makassar sejauh ini masalah yang dihadapi masih mampu dikendalikan oleh para implementor melalui pengoptimalan sosialisasi terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak dalam mewujudkan kota Makassar sebagai kota yang layak anak melalui kegiatan-kegiatan atau program serta pelatihan dan workshop untuk

mengenalinya segala bentuk tindak kekerasan atau perlakuan salah terhadap anak baik di tingkat pemerintahan juga masyarakat.

## 2. Karakteristik kebijakan.

Kemampuan para implementor dalam menstrukturkan isi kebijakan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di kota Makassar sejauh ini dapat dikatakan sudah berjalan baik, hal ini dapat dibuktikan dengan komitmen pemerintah kota Makassar dengan membuat regulasi terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak yang dituangkan dalam Peraturan Daerah kota Makassar Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak serta kedudukan kota Makassar yang saat ini sudah berada pada kategori Nindya dalam mewujudkan KLA karena banyaknya inovasi dan program yang dihadirkan oleh kota Makassar dalam rangka pemenuhan hak dan perlindungan anak. Selain itu anak korban kasus kekerasan di kota Makassar mulai mengalami penurunan dari tahun 2018 sebanyak 829 kasus, tahun 2019 menurun menjadi 678 kasus dan tahun 2020 turun menjadi 132 kasus. Tetapi perlu adanya peningkatan anggaran agar seluruh indikator Kota Layak Anak (KLA) dapat terpenuhi dan terwujudnya kota Makassar sebagai kota yang layak bagi anak.

## 3. Lingkungan kebijakan.

Dalam implementasi kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di kota Makassar sejauh ini kondisi sosial-ekonomi masih menjadi salah satu faktor penyebab utama banyaknya anak yang menjadi korban kekerasan yang masih sulit untuk dipenuhi oleh pemerintah karena pemenuhan hak ekosob pada dasarnya dilakukan secara bertahap. Serta kuantitas sumber daya manusia tidak sebanding dengan kualitas yang dimiliki dalam memahami pemenuhan hak dan perlindungan anak untuk menjalankan kebijakan KLA di kota Makassar.

Menurunnya angka kekerasan terhadap anak membuktikan bahwa layanan yang diberikan oleh P2TP2A kota Makassar sudah berjalan dengan baik yang berupa layanan pengaduan, layanan konseling, layanan psikiater, layanan bantuan hukum dan pendampingan, layanan medis (rujukan), layanan rehabilitasi (rumah aman) dan reintegrasi.

## b. Implikasi

Hasil penelitian ini terkait Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di kota Makassar pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Makassar merupakan salah satu bukti ilmiah akan pentingnya pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak demi mewujudkan kota layak anak yang menempatkan anak sebagai arus utama dalam perencanaan pembangunan kota yang diatur dalam

regulasi kebijakan Peraturan Walikota kota Makassar Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kota Layak Anak (KLA).

### c. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas saran yang dapat peneliti sampaikan yaitu:

1. Bagi Dinas PPPA kota Makassar, untuk mengurangi angka kekerasan yang terjadi pada anak dalam rangka mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) maka harus ditingkatkan upaya dalam bentuk pencegahan melalui program atau kegiatan agar resiko anak menjadi korban dapat menurun.
2. Kepedulian pemerintah terhadap pemberian dan pemenuhan hak masyarakat tergolong miskin perlu ditingkatkan sebab faktor ekonomi merupakan salah satu faktor utama pemicu terjadinya kekerasan terhadap anak.
3. Kerjasama dan koordinasi antar SKPD atau pemerintah daerah kota Makassar dalam pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak perlu ditingkatkan, serta perlu adanya peningkatan anggaran dalam pelaksanaan implementasi kebijakan KLA di kota Makassar agar indikator KLA dapat segera terpenuhi dan terwujudnya kota Makassar sebagai kota yang layak bagi anak.

## 8. Daftar Pustaka

- Abdi, R. B. (2014). *Skripsi Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Agustino, L. (2008). *Dasar - dasar Kebijakan Publik* (Edisi 2). ALFABETA.
- Agustino, L. (2017). *Dasar - dasar Kebijakan Publik* (Edisi 7). ALFABETA.
- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Administrasi Publik*, 1(1).
- AntaraNews.com. (2019). *Tiga kota raih predikat Utama Kabupaten/Kota Layak Anak 2019*.  
<https://www.antaranews.com/berita/972904/tiga-kota-raih-predikat-utama-kabupaten-kota-layak-anak-2019>
- Aslinda. (2014). *Model Koalisi Advokasi Dalam Perubahan Kebijakan Tata Ruang di Kota Makassar*.
- Dianto, M. E. (2015). *Skripsi Implementasi Program Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Dunn, W. N. (2012). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (2nd ed.). Gadjah mada University Press.
- Hamudy, M. I. A. (2015). Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak di Surakarta dan Makassar. *Bina Praja*, 7(2).

- Nur, A. Cudai. (2018) *Peranan dan Tantangan Kebijakan Publik*. AGMA
- Undang - Undang Dasar Negara Tahun, (1945).
- Peraturan Menteri Negara Nomor 11 Tahun 2011, (2011).
- Peraturan Menteri Negara Nomor 12 Tahun 2011, (2011).
- Undang - Undang Nomor 35 Tahun Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (2014).
- IndoNews.id. (2019). *Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak 2019*.  
<https://indonews.id/mobile/artikel/22570/Penghargaan-Kabupaten-Kota-Layak-Anak-2019/>
- Patilima, H. (2017). Kabupaten Kota Layak Anak. *Kriminologi Indonesia*, 13(Mei).
- Profil Anak Indonesia 2018*. (2018).
- Selatan, P. P. S. (2020). *Pemprov Sulsel Target Jadi Provinsi Layak Anak*.  
<https://sulselprov.go.id/welcome/post/tahun-2020-pemprov-sulsel-target-jadi-provinsi-layak-anak>
- Peraturan Walikota Makassar Nomor 2 Tahun 2017, (2017).
- Subarsono, A. (2015). *Analisis Kebijakan Publik* (VII). Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, D. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (20th ed.). ALFABETA.
- Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. ALFABETA.
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses* (1st ed.). Media Pressindo.
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan Publik Era Globalisasi*. CAPS (Center of Academic Publishing Service).